PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DESA PADA PROGRAM KOPERASI MERAH PUTIH DI KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

Marcelino Defajri
NPP. 33.0268
Program Studi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat
Email: marcelinodefajri05@gmail.com
Pembimbing Skripsi : Aleknaek Martua, M.E.
Email: aleknaek@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Rural economic empowerment programs in Indonesia, including Village-Owned Enterprises (BUMDes), have faced persistent challenges related to low community participation, suboptimal governance, and limited economic impact at the grassroots level. These structural gaps necessitate an alternative institutional model that better aligns with community values and promotes genuine participatory development.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze and describe the economic empowerment of rural communities through the Red and White Cooperative (Koperasi Merah Putih) Program in Mukomuko Regency, Bengkulu Province, and to identify its supporting and inhibiting factors.* ***Method:*** *The research employs a qualitative approach with a descriptive case study method. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document study across five pilot villages: Lubuk Sanai II, Lubuk Gedang, Sumber Makmur, Pulai Payung, and Nelan Indah. Data analysis used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña (2014), grounded in Edi Suharto's (2005) empowerment theory covering individual (micro), institutional (mezzo), and social environment (macro) dimensions.* ***Result:*** *(1) Individual dimension: the program increases members' capacity and income by 10–20%, yet training access remains limited due to travel distances; (2) Institutional dimension: all cooperatives maintain structures and conduct Annual Member Meetings (RAT), but non-RAT participation is low and financial transparency remains suboptimal; (3) Social environment dimension: local government commitment is strong (44 facility points, Task Force, notary exemptions), social capital is robust, yet banking access is difficult and inter-agency coordination is suboptimal.* ***Conclusion:*** *Key supporting factors include local government commitment, comprehensive regulations, diverse local economic potential, and a strong mutual cooperation culture. This study recommends rotating mobile training, relaxed banking facilitation, minimal office provision, and optimisation of the Acceleration Task Force.*

Keywords: *Economic empowerment; Red and White Cooperative; individual dimension; institutional dimension; social environment dimension.*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Program pemberdayaan ekonomi perdesaan di Indonesia, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), masih menghadapi tantangan rendahnya partisipasi masyarakat, tata kelola yang belum optimal, dan dampak ekonomi yang belum signifikan di tingkat akar rumput. Kesenjangan struktural ini mendorong perlunya model kelembagaan alternatif yang lebih selaras dengan nilai-nilai kebersamaan masyarakat dan mendorong pembangunan partisipatif yang nyata. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Mukomuko serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode

deskriptif studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi di lima desa percontohan: Lubuk Sanai II, Lubuk Gedang, Sumber Makmur, Pulai Payung, dan Nelan Indah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) berdasarkan kerangka teori pemberdayaan Edi Suharto (2005) yang mencakup dimensi individu (mikro), kelembagaan (mezzo), dan lingkungan sosial (makro). **Hasil/Temuan:** (1) Dimensi individu: program meningkatkan kapasitas dan pendapatan anggota sebesar 10–20%, namun akses pelatihan terbatas karena jarak tempuh 1,5–2 jam ke lokasi pelatihan; (2) Dimensi kelembagaan: seluruh koperasi memiliki struktur organisasi dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) rutin, tetapi partisipasi non-RAT rendah dan transparansi keuangan belum optimal akibat keterbatasan SDM dan sarana; (3) Dimensi lingkungan sosial: dukungan pemerintah kuat melalui pembangunan 44 titik sarana koperasi, Satgas Percepatan, dan pembebasan biaya notaris; modal sosial gotong royong baik; namun akses perbankan sulit dan koordinasi lintas instansi belum optimal. **Kesimpulan:** Faktor pendukung meliputi komitmen pemerintah daerah, regulasi lengkap (Inpres No. 9/2025; Permen Koperasi No. 1/2025; PMK No. 49/2025), potensi ekonomi lokal beragam, dan budaya gotong royong. Faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas SDM pengurus, sulitnya akses permodalan, kurangnya sarana kantor, dan lemahnya koordinasi antar instansi. Penelitian merekomendasikan pelatihan bergilir, fasilitasi perbankan dengan persyaratan lunak, penyediaan sarana kantor minimal, serta optimalisasi Satgas Percepatan Koperasi Merah Putih.

Kata kunci: Pemberdayaan ekonomi; Koperasi Merah Putih; dimensi individu; dimensi kelembagaan; dimensi lingkungan sosial.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi desa merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan inklusif dan pengentasan kemiskinan di Indonesia. Sebagai negara agraris dengan lebih dari 70.000 desa, potensi ekonomi lokal yang dimiliki wilayah pedesaan menjadi tulang punggung ketahanan nasional (BPS Kabupaten Mukomuko, 2024). Namun tantangan klasik seperti keterbatasan akses modal, rendahnya kapasitas manajerial, dan minimnya inovasi produk masih menjadi penghambat utama optimalisasi potensi tersebut (Masyhuri, 2024). Kondisi ini diperparah lemahnya kelembagaan ekonomi desa dan terbatasnya akses teknologi serta pasar modern. Ndraha dan Uang (2018) menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa melalui pengembangan ekonomi lokal memerlukan sinkronisasi sektoral antara pemerintah, swasta, dan komunitas di mana faktor komunikasi, pemetaan potensi wilayah, kualitas SDM, infrastruktur, serta pemantauan dan evaluasi menjadi penentu keberhasilan strategi pemberdayaan. Berdasarkan data Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (2024), sekitar 45% desa di Indonesia masih berada dalam kategori desa tertinggal dan berkembang, mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Dalam perspektif global, pemberdayaan ekonomi masyarakat desa sejalan dengan agenda Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan Pertama (Tanpa Kemiskinan) dan Tujuan Kedelapan (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Komitmen global ini menekankan pentingnya pendekatan pembangunan inklusif yang memastikan tidak ada satu pun masyarakat yang tertinggal (Wijayanto et al., 2025). Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia meluncurkan Program Koperasi Merah Putih sebagai alternatif pendekatan pemberdayaan ekonomi berbasis nilai

kebersamaan dan semangat nasionalisme (Saputri et al., 2025). Program ini diposisikan sebagai instrumen untuk mengatasi berbagai kelemahan model BUMDes sebelumnya (Wardani et al., 2023).

Secara konstitusional, koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Gagasan ini bersumber dari pemikiran Mohammad Hatta, Bapak Koperasi Indonesia, yang menempatkan koperasi bukan sekadar badan usaha melainkan gerakan ekonomi kerakyatan yang tumbuh dari kesadaran masyarakat secara bottom-up. Dalam pandangan Hatta, koperasi yang sehat adalah yang mengajarkan kemandirian, demokrasi ekonomi, dan tanggung jawab kolektif kepada anggotanya nilai-nilai yang kini mendasari Program Koperasi Merah Putih.

Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dalam implementasi program ini. Sebagai kabupaten dengan sektor pertanian dan perikanan yang dominan, Mukomuko memiliki potensi ekonomi lokal yang signifikan dalam komoditas kelapa sawit, karet, dan hasil perikanan. Namun berdasarkan data BPS Kabupaten Mukomuko (2024), sekitar 11% penduduk desa masih tergolong miskin dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,14%. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya akses permodalan dan lemahnya jejaring pemasaran produk lokal, menunjukkan perlunya intervensi kelembagaan seperti Koperasi Merah Putih.

Keberhasilan Kabupaten Mukomuko dalam mencapai target pembentukan 151 Koperasi Merah Putih berbadan hukum (100% ketercapaian per Mei 2025) dengan 98% tersebar di wilayah desa menjadi prestasi tersendiri di tingkat Provinsi Bengkulu. Lima desa percontohan nasional dari Mukomuko (Lubuk Sanai II, Lubuk Gedang, Sumber Makmur, Pulai Payung, dan Nelan Indah) terpilih karena kecepatannya melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdessus) serta ketuntasan pembuatan badan hukum untuk kegiatan sektor riil. Terlepas dari keberhasilan administratif tersebut, evaluasi komprehensif terhadap proses pemberdayaan ekonomi masyarakat secara multidimensi belum pernah dilakukan, menjadi gap penelitian yang diisi oleh kajian ini.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat dua kesenjangan mendasar yang melatarbelakangi penelitian ini. Pertama, kesenjangan kontekstual: belum ada penelitian yang mengkaji pemberdayaan masyarakat pada Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Mukomuko yang memiliki konteks sosio-ekonomi unik dengan potensi pertanian dan perikanan dominan namun dihadapkan pada tantangan infrastruktur dan akses pasar yang terbatas. Kedua, kesenjangan bukti: penelitian terdahulu tentang Koperasi Merah Putih masih terbatas pada aspek kebijakan dan tata kelola (Saputri et al., 2025; Wijayanto et al., 2025) atau berfokus pada kesiapan SDM (Rahmi et al., 2025), sedangkan studi mengenai dampak empiris program terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara multidimensi mencakup peningkatan pendapatan, perluasan kesempatan kerja, dan penguatan kapasitas usaha mikro masih sangat minim.

Penelitian yang paling mendekati pendekatan ini adalah kajian Laturua dan Hutuley (2024) tentang Kelompok Wanita Tani di Seram Bagian Barat yang menggunakan tiga aras pemberdayaan Edi Suharto. Namun objek dan konteks geografisnya berbeda secara signifikan. Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut dengan memadukan fokus pada Program Koperasi Merah Putih yang belum pernah diteliti secara empiris di Mukomuko dengan pendekatan multidimensi pemberdayaan Edi Suharto pada tiga level: individu (mikro), kelembagaan (mezzo), dan lingkungan sosial desa (makro).

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Mukomuko sebagai dasar perumusan strategi oleh pemerintah daerah dalam mengoptimalkan implementasi program di tengah tantangan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, akses permodalan, dan infrastruktur. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kebijakan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola keberhasilan dan hambatan program secara faktual, sehingga perumusan strategi keberlanjutan Koperasi Merah Putih berisiko tidak tepat sasaran dan kurang efektif dalam jangka panjang

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui lembaga lokal seperti koperasi, BUMDes, dan kelompok usaha. Saputri et al. (2025) dan Wijayanto et al. (2025) mengkaji Program Koperasi Merah Putih sebagai model kelembagaan desa, namun fokus keduanya terletak pada aspek tata kelola, regulasi, dan integrasi program dengan agenda pembangunan desa, sehingga belum menilai bagaimana koperasi tersebut berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi secara empiris di tingkat desa. Masyhuri (2024) dan Kawung et al. (2023) menguatkan pentingnya partisipasi dan kepemimpinan lokal sebagai determinan keberhasilan pemberdayaan, tetapi tanpa menyoroti model kelembagaan koperasi yang menjadi konteks penelitian ini, sementara Suyanto et al. (2024) dan Wardani et al. (2023) lebih berfokus pada kegiatan penyuluhan dan pengelolaan BUMDes sehingga tidak sepenuhnya merepresentasikan dinamika Koperasi Merah Putih yang menekankan pendekatan partisipatif dan nilai kebersamaan.

Penelitian Rahmi et al. (2025) menjadi salah satu yang paling dekat dengan fokus penelitian ini karena menyoroti kesiapan sumber daya manusia dalam pelaksanaan Koperasi Merah Putih, namun kajian tersebut masih terbatas pada aspek kesiapan pelaksana program dan belum mengkaji dampak pemberdayaan ekonomi masyarakat desa secara substantif. Sejumlah penelitian lain menggunakan teori pemberdayaan Edi Suharto, antara lain Laturua dan Hutuely (2024) yang meneliti pemberdayaan Kelompok Wanita Tani di Desa Lokki, Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan menerapkan tiga aras pemberdayaan (mikro, mezzo, makro) untuk menganalisis penyediaan sumber daya, kesempatan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja. Meskipun menggunakan kerangka teori yang sama, objek penelitian Laturua dan Hutuely (2024) adalah kelompok tani di sektor pertanian spesifik dengan karakteristik sosial-ekonomi yang berbeda dari Kabupaten Mukomuko, sehingga belum ada penelitian yang mengintegrasikan tiga dimensi pemberdayaan Edi Suharto secara komprehensif dalam menilai efektivitas Koperasi Merah Putih sebagai kelembagaan ekonomi multisektor di wilayah luar Pulau Jawa. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menunjukkan dominasi kajian pada aspek kebijakan, tata kelola, dan kesiapan sumber daya manusia, sementara evaluasi dampak pemberdayaan ekonomi secara langsung dan mendalam pada Koperasi Merah Putih masih sangat terbatas.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dari seluruh kajian terdahulu karena memadukan tiga keunggulan sekaligus: (a) fokus pada Program Koperasi Merah Putih yang belum pernah diteliti secara empiris di Kabupaten Mukomuko; (b) penggunaan pendekatan multidimensi pemberdayaan Edi Suharto (2005) pada tiga level individu, kelembagaan, dan lingkungan social sebagaimana dioperasionalkan oleh Laturua dan Hutuley (2024); dan (c) pengambilan

data primer melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi di lima desa percontohan yang mewakili heterogenitas potensi ekonomi lokal Mukomuko. Penelitian ini menghasilkan bukti empiris akar rumput yang memperluas literatur tentang pemberdayaan ekonomi berbasis koperasi di wilayah perdesaan luar Jawa.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa pada Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Mukomuko.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif studi kasus. Menurut Sugiyono (2022:15), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, menekankan makna daripada generalisasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Creswell dan Poth (2018:32) bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan dengan menekankan konteks dan interpretasi makna.

Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini memusatkan perhatian pada satu fenomena tertentu implementasi Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Mukomuko dengan batas konteks yang jelas. Yin (2018) menjelaskan bahwa studi kasus adalah pendekatan tepat untuk meneliti fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, ketika batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak secara tegas. Peneliti berperan sebagai instrumen utama (human instrument) yang berinteraksi langsung dengan subjek penelitian (Nasution, 2017).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara mendalam semi-terstruktur terhadap 15 informan yang dipilih secara purposive sampling, meliputi pengurus koperasi (6 orang), anggota koperasi (4 orang), petugas Dinas Perindagkop dan UKM (1 orang), kepala desa (3 orang), dan tokoh masyarakat (1 orang); (2) observasi partisipatif pada kegiatan rapat anggota, pelatihan, dan aktivitas usaha koperasi; serta (3) studi dokumentasi terhadap AD/ART koperasi, laporan keuangan, notulen rapat, RPJMDes, dan kebijakan terkait.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014:31) yang terdiri atas tiga tahapan: (1) reduksi data pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data berdasarkan tiga dimensi teori Edi Suharto; (2) penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, kutipan langsung, dan diagram tematik; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui triangulasi sumber dan metode Lincoln dan Guba (1985:301). Analisis dilakukan secara bersamaan (concurrent) dengan pengumpulan data secara iteratif hingga mencapai titik kejenuhan data (data saturation). Lokasi penelitian ditetapkan di lima desa percontohan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Mukomuko yang dilaksanakan pada periode Januari–Februari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi di lima desa lokasi penelitian, bagian ini menyajikan temuan empiris mengenai implementasi Program Koperasi Merah Putih dalam perspektif pemberdayaan ekonomi masyarakat desa di Kabupaten Mukomuko. Analisis mengacu pada tiga dimensi pemberdayaan Edi Suharto (2005) sebagaimana dioperasionalkan oleh Laturua dan Hutuley (2024).

3.1. Dimensi Individu: Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian Anggota

Dimensi individu dalam pemberdayaan masyarakat menekankan penguatan kapasitas personal agar anggota mampu berperan aktif sebagai subjek pembangunan. Edi Suharto dalam Laturua dan Hutuley (2024) menjelaskan bahwa pemberdayaan individu (mikro) berfokus pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri masyarakat sehingga mampu mengambil inisiatif, membuat keputusan, serta mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Hal ini sejalan dengan teori psychological empowerment Zimmerman (2000) yang mencakup aspek intrapersonal (kepercayaan diri dan motivasi), interactional (kemampuan memahami sistem sosial dan peluang), dan behavioral (partisipasi aktif dalam kegiatan sosial-ekonomi).

Temuan di lapangan menunjukkan tiga indikator pencapaian dimensi individu. Pertama, peningkatan kapasitas individu: anggota koperasi di seluruh lokasi penelitian telah mengikuti pelatihan yang difasilitasi pemerintah daerah. Ketua Koperasi Merah Putih Desa Lubuk Gedang, Bapak Desjayadi (wawancara, 12 Januari 2026), menyampaikan: "Kami sudah dua kali mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Mukomuko. Ilmunya sangat membantu, terutama untuk bendahara yang sebelumnya belum pernah membuat laporan keuangan." Di Desa Pulai Payung, pelatihan digital marketing terbukti mengubah perilaku ekonomi anggota Bapak Kaci (wawancara, 19 Januari 2026) mulai memasarkan produk melalui media sosial dan mendapat bantuan pembuatan kemasan menarik dari koperasi.

Kedua, kemandirian ekonomi anggota: di Desa Lubuk Sanai II, sistem penjualan kolektif Tandan Buah Segar (TBS) sawit langsung ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) meningkatkan pendapatan anggota sekitar 15–20% dibanding sebelum bergabung koperasi (Bapak Hengki, wawancara, 14 Januari 2026). Di Desa Nelan Indah, program simpan pinjam membantu nelayan membeli alat tangkap dengan bunga rendah, meningkatkan hasil tangkapan, dan memungkinkan pelunasan pinjaman dalam setahun (Bapak Radi, wawancara, 21 Januari 2026). Temuan ini konsisten dengan hasil Masyhuri (2024) bahwa koperasi berperan signifikan dalam meningkatkan akses modal masyarakat pedesaan. Nuryanti dan Rahmadanita (2026) dalam penelitiannya tentang pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi kreatif desa menegaskan bahwa aspek bina manusia berupa pelatihan keterampilan dan aspek bina usaha yang menghasilkan peningkatan pendapatan merupakan dua pilar utama keberhasilan pemberdayaan berbasis kelembagaan desa relevan dengan dinamika yang terjadi di lima desa percontohan Mukomuko. Ketiga, kepercayaan diri dan motivasi usaha meningkat signifikan, sebagaimana diobservasi pada rapat anggota Desa Lubuk Gedang di mana anggota aktif bertukar informasi peluang pasar.

Kendala utama dimensi individu adalah aksesibilitas pelatihan. Petugas Dinas Perindagkop dan UKM, Bapak Denny Haryadi (wawancara, 10 Januari 2026), menjelaskan bahwa anggota dari Desa Nelan Indah harus menempuh perjalanan sekitar 1,5 jam ke lokasi pelatihan di ibu kota kecamatan, menyebabkan rendahnya tingkat kehadiran. Kondisi ini serupa dengan temuan Laturua dan Hutuley (2024) tentang minimnya pelatihan pengolahan hasil panen yang melemahkan dimensi keterampilan pada Kelompok Wanita Tani di Seram Bagian Barat. Ke depan, diperlukan inovasi metode pelatihan bergilir dan pendampingan berbasis desa.

3.2. Dimensi Kelembagaan: Partisipasi dan Tata Kelola Koperasi

Dimensi kelembagaan berfokus pada penguatan organisasi koperasi sebagai wadah partisipasi dan pengelolaan sumber daya bersama. Chambers (2017) dalam Rural Development: Putting the Last First menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan pedesaan sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan lokal, di mana koperasi berfungsi

sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pembangunan. Narayan (2002) dari Bank Dunia menambahkan bahwa kelembagaan lokal merupakan bentuk nyata dari social capital yang memperkuat posisi tawar masyarakat kecil dalam mengakses sumber daya, modal, dan pasar.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh Koperasi Merah Putih di lima desa penelitian telah melaksanakan RAT secara rutin dan memiliki struktur organisasi lengkap sesuai pedoman Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025. Ketua Koperasi Merah Putih Desa Sumber Makmur, Bapak Marwan Efendi (wawancara, 15 Januari 2026), menjelaskan: "Kami mengadakan RAT setiap bulan Maret. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat, dan setiap anggota memiliki hak suara yang sama." Prinsip ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Namun partisipasi anggota dalam rapat non-RAT (rapat bulanan dan rapat khusus) masih rendah sebagaimana diakui oleh Sekretaris Koperasi Sumber Makmur, Bapak Rochmat Nugroho (wawancara, 15 Januari 2026): "Anggota antusias hadir saat pembahasan SHU, namun kami kesulitan mengajak anggota hadir di rapat bulanan." Transparansi keuangan pun beragam: Desa Lubuk Gedang telah memasang papan informasi keuangan bulanan, sementara Desa Nelan Indah masih menyampaikan informasi secara lisan (Bapak Radi, wawancara, 21 Januari 2026). Penguatan kapasitas teknis pengurus terutama penyusunan laporan keuangan diidentifikasi sebagai kebutuhan mendesak. Temuan ini selaras dengan Suyanto et al. (2024) yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola kelembagaan sebagai prasyarat peningkatan ekonomi warga. Iswari (2024) dalam kajiannya tentang BUM Desa sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat menemukan pola serupa: lembaga ekonomi desa yang berperan sebagai inkubator usaha dan penyedia kebutuhan masyarakat terbukti mampu meningkatkan pendapatan petani, namun dampaknya masih terbatas apabila kapasitas tata kelola internal belum dikuatkan implikasi yang langsung relevan bagi penguatan dimensi kelembagaan Koperasi Merah Putih di Mukomuko. Selain itu, Meilinda et al. (2026) melalui systematic review terhadap 62 studi pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah daerah menyimpulkan bahwa ekspansi mekanisme partisipasi di tingkat lokal belum selalu diikuti pendalaman kuasa warga yang konsisten; hasil pemberdayaan yang lebih kuat hanya tercapai bila desain institusional, komitmen politik, dan strategi inklusi dirancang secara deliberatif temuan ini memperkuat urgensi penguatan transparansi dan partisipasi anggota non-RAT di Koperasi Merah Putih Mukomuko.

3.3. Dimensi Lingkungan Sosial: Dukungan Eksternal dan Manfaat Sosial Ekonomi

Dimensi lingkungan sosial berkaitan dengan kondisi eksternal yang mempengaruhi keberhasilan pemberdayaan, seperti dukungan kebijakan, infrastruktur, dan budaya lokal. Sen (2009) dalam Development as Freedom menjelaskan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kebebasan manusia, termasuk kebebasan ekonomi dan sosial, yang membutuhkan lingkungan sosial kondusif dari pemerintah, lembaga masyarakat, dan sektor swasta. Friedmann (1992) dalam Empowerment: The Politics of Alternative Development menegaskan bahwa lingkungan sosial berfungsi sebagai ruang emansipasi di mana masyarakat memperjuangkan hak-hak ekonominya melalui partisipasi sosial dan politik.

Temuan penelitian menunjukkan komitmen pemerintah daerah yang kuat. Bapak Denny Haryadi (wawancara, 10 Januari 2026) merinci empat bentuk dukungan konkret: pembebasan biaya akta notaris, penyediaan tenaga pendamping per kecamatan,

penganggaran pelatihan dalam APBD, dan fasilitasi kemitraan dengan BUMN (Bulog, ID FOOD). Hingga November 2025, sebanyak 44 titik pembangunan fisik Koperasi Merah Putih telah dimulai di Kabupaten Mukomuko, dan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih telah dibentuk di bawah koordinasi langsung Bupati Mukomuko. Dukungan ini merefleksikan prinsip yang ditegaskan Ryaas Rasyid (2000:55) bahwa inti good governance adalah kemampuan pemerintah memberdayakan masyarakat melalui kebijakan partisipatif dan akuntabel.

Modal sosial gotong royong masyarakat Mukomuko yang diwarisi dari tradisi transmigrasi menjadi kekuatan pendukung implementasi program. Tokoh Masyarakat Desa Pulai Payung, Bapak Budi Santoso (wawancara, 18 Januari 2026), menyampaikan: "Budaya saling membantu sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari. Koperasi sejalan dengan nilai-nilai itu bukan sekadar tempat simpan pinjam, tetapi wadah untuk saling menguatkan ekonomi." Hal ini memperkuat argumen Kawung et al. (2023) tentang pentingnya kepemimpinan lokal dan kohesi sosial sebagai determinan keberhasilan pemberdayaan. Ginting dan Wahyuningsih (2024) menambahkan bahwa pemimpin local khususnya kepala desa memainkan peran krusial dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan kemampuan dan potensi sumber daya wilayah; optimalisasi peran kepala desa terbukti menentukan kualitas pelaksanaan program pembangunan, sebagaimana tercermin dari komitmen kepala desa di lima lokasi penelitian ini dalam mendorong partisipasi warga pada musyawarah pembentukan dan pengelolaan Koperasi Merah Putih.

Di sisi lain, akses perbankan masih menjadi hambatan. Ketua Koperasi Desa Lubuk Gedang mengungkapkan bahwa pengajuan pinjaman ke BRI terhambat persyaratan minimal 500 anggota dan agunan yang belum dimiliki koperasi. Meski Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 telah membuka skema KUR Himbara dengan plafon Rp3 miliar dan bunga 6%, kesenjangan antara kebijakan dan implementasi masih signifikan. Manfaat sosial koperasi telah mulai dirasakan: anggota Desa Pulai Payung, Bapak Kaci (wawancara, 19 Januari 2026), memperluas usaha dan menambah karyawan dari 1 menjadi 3 orang; sementara Kepala Desa Lubuk Sanai II mencatat penurunan jumlah warga yang berutang ke rentenir sejak koperasi beroperasi.

3.4. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Pemberdayaan

Berdasarkan analisis terhadap tiga dimensi pemberdayaan, penelitian ini mengidentifikasi empat faktor pendukung utama dan lima faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pemberdayaan ekonomi melalui Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Mukomuko. Identifikasi ini penting sebagai dasar rekomendasi kebijakan perbaikan implementasi program.

Faktor pendukung meliputi: (1) Komitmen tinggi pemerintah daerah, terbukti dari pencapaian target 100% pembentukan koperasi, pembangunan 44 titik sarana fisik, dan alokasi APBD khusus untuk koperasi percontohan; (2) Modal sosial dan budaya gotong royong yang kuat selaras dengan Ife dan Tesoriero (2014) tentang community development berbasis nilai-nilai kebersamaan; (3) Ketersediaan kerangka regulasi komprehensif (Inpres No. 9/2025; Permenk No. 1/2025; PMK No. 49/2025) yang memberikan kepastian hukum dan pedoman operasional; serta (4) Beragamnya potensi ekonomi lokal (sawit, karet, padi, perikanan, perdagangan) yang memungkinkan setiap koperasi mengembangkan unit usaha sesuai karakteristik wilayah.

Faktor penghambat meliputi: (1) Keterbatasan kapasitas SDM pengurus, terutama dalam manajemen keuangan dan akuntansi koperasi seluruh 5 ketua koperasi lokasi penelitian mengakui ini sebagai kendala utama, sementara pelatihan hanya 2 hari dirasa tidak

mencukupi; (2) Sulitnya akses permodalan, dengan rata-rata proses pengajuan kredit memakan lebih dari tiga bulan dan persyaratan berat (minimal 500 anggota, agunan memadai); (3) Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas, di mana jarak tempuh 1,5–2 jam ke pusat pelatihan menghambat distribusi kapasitas secara merata; (4) Kurangnya sarana kantor dan operasional beberapa koperasi masih menumpang di balai desa tanpa papan informasi; serta (5) Koordinasi antar instansi yang belum optimal, menyebabkan kebingungan perizinan dan prosedur tidak terintegrasi.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini memperluas dan memperkuat literatur pemberdayaan masyarakat pedesaan berbasis koperasi di beberapa hal. Pertama, peningkatan pendapatan anggota sebesar 10–20% sejalan dengan proyeksi Kementerian Koperasi dan UKM (2025) bahwa koperasi yang melibatkan anggota aktif dalam musyawarah tahunan mengalami peningkatan aset rata-rata 15–25% per tahun. Ini menegaskan bahwa keberhasilan ekonomi koperasi tidak hanya ditentukan modal finansial, tetapi kualitas kelembagaan partisipatif (Narayan, 2002).

Kedua, pola hambatan yang ditemukan terutama rendahnya kapasitas SDM dan terbatasnya akses permodalan konsisten dengan temuan Masyhuri (2024) dan Saputri et al. (2025) tentang tantangan umum koperasi pedesaan Indonesia. Namun, konteks Mukomuko menambahkan dimensi aksesibilitas geografis yang lebih kompleks dibandingkan desa-desa penelitian sebelumnya. Sesuai pandangan Mardiasmo (2018:15), keberhasilan program pemberdayaan berbasis koperasi sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah menyediakan akses permodalan, pelatihan, dan pendampingan teknis.

Ketiga, berbeda dari temuan Laturua dan Hutuley (2024) di mana dimensi keterampilan kerja menjadi yang paling lemah, penelitian ini menemukan bahwa dimensi transparansi kelembagaan justru menjadi titik lemah paling kritis tidak hanya karena keterbatasan teknis SDM, tetapi juga absennya sarana administrasi dasar (papan informasi, arsip tertulis). Temuan ini menambahkan bukti empiris bahwa infrastructure gap bukan hanya soal jalan dan jembatan, melainkan juga infrastruktur kelembagaan koperasi itu sendiri.

Keempat, keberhasilan Program Koperasi Merah Putih dalam memperkuat solidaritas sosial masyarakat desa sebagaimana diungkapkan tokoh masyarakat dan kepala desa mendukung argumen Friedmann (1992) tentang pemberdayaan sebagai proses emansipasi sosial yang melampaui aspek ekonomi semata. Program ini tidak hanya meningkatkan pendapatan individu, tetapi secara bertahap memulihkan kohesi sosial yang mulai melemah akibat pengaruh modernisasi dan individualisme.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik tambahan adalah kuatnya nexus antara sejarah transmigrasi Mukomuko dengan keberhasilan awal program koperasi. Populasi transmigrasi yang mendominasi 35–37% penduduk berasal dari Jawa dengan tradisi arisan, simpan pinjam, dan gotong royong menciptakan modal sosial yang lebih kondusif bagi pengembangan koperasi dibandingkan daerah lain. Ini menunjukkan bahwa faktor historis-demografis perlu dipertimbangkan sebagai variabel konteks dalam evaluasi program pemberdayaan serupa di wilayah lain.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Koperasi Merah Putih di Kabupaten Mukomuko telah memberikan kontribusi positif terhadap pemberdayaan ekonomi

masyarakat desa, meski masih menghadapi sejumlah tantangan struktural yang perlu diatasi secara sistematis.

Pada dimensi individu, program meningkatkan kapasitas dan pendapatan anggota sebesar 10–20%, namun akses pelatihan terbatas karena jarak tempuh 1,5–2 jam ke lokasi pelatihan, menyebabkan penyerapan materi tidak merata. Pada dimensi kelembagaan, seluruh koperasi telah memiliki struktur organisasi dan melaksanakan RAT rutin, namun partisipasi anggota dalam rapat non-RAT rendah dan transparansi keuangan belum optimal akibat keterbatasan SDM dan sarana administrasi. Pada dimensi lingkungan sosial, dukungan pemerintah daerah sangat kuat (44 titik sarana fisik, Satgas Percepatan, pembebasan biaya notaris) dan modal sosial gotong royong berjalan baik; namun akses perbankan sulit, infrastruktur terbatas, dan koordinasi lintas instansi belum optimal.

Faktor pendukung utama meliputi komitmen Pemerintah Kabupaten Mukomuko, regulasi lengkap (Inpres No. 9/2025; Permen Koperasi No. 1/2025; PMK No. 49/2025), potensi ekonomi lokal beragam, dan budaya gotong royong yang kuat. Faktor penghambat meliputi keterbatasan kapasitas SDM pengurus, sulitnya akses permodalan, kurangnya sarana kantor, dan lemahnya koordinasi antar instansi.

Penelitian merekomendasikan: (1) pelatihan bergilir per kecamatan untuk mengatasi kendala jarak; (2) perjanjian kerja sama khusus dengan bank Himbara yang meringankan persyaratan (minimal anggota diturunkan dari 500 menjadi 100); (3) penyediaan sarana kantor minimal (ruang sekretariat, lemari arsip, papan informasi); (4) optimalisasi Satuan Tugas Percepatan sebagai koordinator terpadu lintas instansi; serta (5) penguatan kapasitas pengurus melalui pendampingan teknis berjenjang dan berkelanjutan dari Dinas Perindagkop.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif di lima desa percontohan, sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasikan secara statistik ke seluruh 151 koperasi di Kabupaten Mukomuko. Faktor musiman yang mempengaruhi pendapatan di Desa Nelan Indah (sektor perikanan) juga belum terukur secara longitudinal.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian kuantitatif untuk mengukur dampak koperasi terhadap pengurangan kemiskinan secara terukur. Kajian longitudinal pasca pendampingan pemerintah juga diperlukan untuk menilai keberlanjutan kemandirian koperasi, khususnya dengan mempertimbangkan heterogenitas karakteristik desa.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Aleknaek Martua, M.E. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Bapak Dr. Halilul Khairi, M.Si. selaku Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Bapak Dr. Andi Pitono, S.Sos, M.Si. selaku Dekan Fakultas Politik Pemerintahan, Bapak Drs. Sayuti, M.T. selaku Ketua Prodi Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, serta seluruh pengurus koperasi, anggota koperasi, kepala desa, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Mukomuko yang telah bersedia menjadi informan penelitian ini. Penelitian ini juga didukung oleh izin resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mukomuko.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Chambers, R. (2017). Rural Development: Putting the Last First. Routledge.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Friedmann, J. (1992). Empowerment: The Politics of Alternative Development. Blackwell.

Ife, J., & Tesoriero, F. (2014). Community Development: Community-Based Alternatives in an Age of Globalisation. Pearson Australia.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. SAGE Publications.

Mardiasmo. (2018). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.

Narayan, D. (2002). Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook. World Bank Publications.

Nasution, S. (2017). Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Tarsito.

Rasyid, M. R. (2000). Makna Pemerintahan: Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan. PT Mutiara Sumber Widya.

Sen, A. (2009). The Idea of Justice. Harvard University Press.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suharto, E. (2005). Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Refika Aditama.

Suharto, E. (2019). Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta.

Yin, R. K. (2018). Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.). SAGE Publications.

Zimmerman, M. A. (2000). Empowerment Theory: Psychological, Organizational, and Community Levels of Analysis. Dalam J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), Handbook of Community Psychology (hlm. 43–63). Springer.

Ginting, A. H., & Wahyuningsih, D. R. (2024). Realizing an Independent Village: The Role of Local Leaders in Improving the Quality of Development Planning. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 9(2), 196–210. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/4673

Iswari, Y. A. (2024). The Role of Village-Owned Enterprises (BUM Desa) in Empowering Rural Communities (Case Study of BUM Desa "Loh Jinawi" in Dawu Village, Paron Subdistrict, Ngawi Regency). J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 9(1), 58–81. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/3817

Laturua, P. P., & Hutuely, I. (2024). Program Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Di Desa Lokki Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat. HIPOTESA, 18(2). https://e-jurnal.stiaalazka.ac.id/index.php/ojs-hipotesa/article/view/95

Masyhuri, M. A. (2024). The Urgency of Cooperative Development in Rural Areas of Indonesia. Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia, 4(4), 266–276. https://doi.org/10.53866/jimi.v4i4.636

Meilinda, S. D., Apriyani, A., Rozie, A., & Hendayana. (2026). Community Empowerment in Local Government Decision Making: A Systematic Review of Models and Implementation. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 10(2), 1–22. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/5866

Ndraha, A. B., & Uang, D. P. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 3(2), 137–149. https://www.academia.edu/download/108860032/551.pdf

Rahmi, N., et al. (2025). Readiness of Village Human Resources in Implementing the Red and White Cooperative. Journal of Rural Studies and Development, 4(1), 77–90.

Nuryanti, N., & Rahmadanita, A. (2026). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif di Desa Mekarsari Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan), 10(2), 23–34. https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/5909

Saputri, A. R., Subandriyo, & Hardiyan, M. I. (2025). Koperasi Desa Merah Putih dalam Perspektif Pembangunan Desa dan Tata Kelola Pemerintahan. Journal of Society Bridge, 3(2), 95–106. https://doi.org/10.59012/jsb.v3i2.83

Suyanto, R., Rahmawati, E. S., & Ramadhan, D. S. (2024). Community Economic Empowerment for the Creation of Self-Sufficient Villages. Help: Journal of Community Service, 1(2), 567–572. https://doi.org/10.62569/hjcs.v1i2.63

Wardani, R. P., Setiawan, T., & Bonti, B. (2023). Increasing Empowerment of Rural Economic Institutions through the Village-Owned Enterprises Development Program. International Journal of Current Science Research and Review, 6(1), 439–448. https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v6-i1-49

Wijayanto, E., Haryati, E., & Ferriswara, D. (2025). Prospek Perkembangan Masif Koperasi Desa Merah Putih untuk Mempercepat Pencapaian SDGs. Kajian Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi, 2(3), 191–204. https://doi.org/10.62383/kajian.v2i3.578

Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa.

Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2025). Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Kementerian Keuangan RI. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko. (2024). Kabupaten Mukomuko Dalam Angka 2024. BPS Kabupaten Mukomuko.

Kementerian Koperasi dan UKM RI. (2025). Data Perkembangan Koperasi Merah Putih Nasional. Diakses dari https://merahputih.kop.id pada 20 November 2025.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI. (2024). Data Desa dan Klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2024. Kemendesa PDTT.